



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 14 November 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan terkait kasus pertanahan
Ketua Rapat	: Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 27 (dua puluh tujuh) dari 47 (empat puluh tujuh) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Koperasi Produsen Perkebunan Masyarakat Adat Buay Mencurung C. Masyarakat Kampung Tomang, Jakarta Barat D. Forum Tani Sejarah Indonesia E. Masyarakat Amal Bersatu F. Masyarakat Adat Pasaman Barat G. Persatuan Masyarakat Rancangbuka Kab. Manggarai Barat, NTT H. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah I. Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia J. Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) K. Tanah Hj. Zubaeda, Cipinang Besar Jakarta Timur

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Koperasi Produsen Perkebunan Masyarakat Adat Buay Mencurung, Masyarakat Kampung Tomang, Jakarta Barat, Forum Patani Sejarah Indonesia, Masyarakat Amal Bersatu, Masyarakat Adat Pasaman Barat, Persatuan Masyarakat Rancangbuka Kab. Manggarai Barat, NTT, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia, dan Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, dengan agenda pembahasan terkait kasus pertanahan, pada hari Senin, 14 November 2022, dibuka pukul 10.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Koperasi Produsen Perkebunan Masyarakat Adat Buay Mencurung, Masyarakat Kampung Tomang, Jakarta Barat, Forum Patani Sejarah Indonesia, Masyarakat Amal Bersatu, Masyarakat Adat Pasaman Barat, Persatuan Masyarakat Rancangbuka Kab. Manggarai Barat, NTT, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia, dan Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, dengan agenda pembahasan terkait kasus pertanahan, sebagai berikut:

Para peserta audiensi menyampaikan permasalahan terkait pertanahan kepada Komisi II DPR RI.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Koperasi Produsen Perkebunan Masyarakat Adat Buay Mencurung, Masyarakat Kampung Tomang, Jakarta Barat, Forum Patani Sejarah Indonesia, Masyarakat Amal Bersatu, Masyarakat Adat Pasaman Barat, Persatuan Masyarakat Rancangbuka Kab. Manggarai Barat, NTT, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia, dan Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, dengan agenda pembahasan terkait kasus pertanahan, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI akan membahas khusus masalah pertanahan dengan Kementerian terkait yaitu Kementerian ATR/BPN RI, Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, PTPN dan TNI.

2. Komisi II DPR RI meminta kepada Para Pengadu untuk melengkapi data – data yang dimiliki sebagai dasar hak atas tanah agar memiliki kekuatan hukum.
3. Komisi II DPR RI akan melakukan *mapping* masalah-masalah pertanahan.
4. Komisi II DPR RI akan tetap melanjutkan Panja – Panja Pertanahan yang sudah terbentuk yaitu Panja Mafia Pertanahan, Panja HGU, HGB, dan HPL, serta Panja Tata Ruang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.36 WIB

Jakarta, 14 November 2022

KETUA RAPAT



Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.

A-426